

TABEL TC-33
RENCANA AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar									
Bidang : Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		98%	4,301,022,208.00			98%	4,516,073,318.40
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas		100%	61,624,902.00			100%	64,706,147.10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	61,624,902.00	APBD		5 Dokumen (Renja, LKIP, LPPD, LPJ dan RKA)	64,706,147.10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100%	3,714,678,528.00			100%	3,900,412,454.40
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	32 Orang/ 14 bulan	3,600,984,913.00	APBD		32 Orang/ 14 bulan	3,781,034,158.65
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	1 Dokumen	84,313,406.00	APBD		1 Dokumen	88,529,076.30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bandar Lampung	2 Laporan	29,380,209.00	APBD		2 Laporan	30,849,219.45
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		80%	24,570,000.00			80%	25,798,500.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bandar Lampung	15 Orang	24,570,000.00	APBD		15 Orang	25,798,500.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD		98%	168,413,307.00			98%	176,833,972.35
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	3,655,091.00	APBD		1 Paket	3,837,845.55
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	25,398,733.00	APBD		1 Paket	26,668,669.65
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	6,941,432.00	APBD		1 Paket	7,288,503.60
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	3,975,000.00	APBD		1 Paket	4,173,750.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Paket	23,297,425.00	APBD		1 Paket	24,462,296.25

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Dokumen	3,900,000.00	APBD		1 Dokumen	4,095,000.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	1 Laporan	12,000,000.00	APBD		1 Laporan	12,600,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	1 Laporan	89,245,626.00	APBD		1 Laporan	93,707,907.30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor		98%	62,643,383.00			98%	65,775,552.15
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Unit	29,618,383.00	APBD		1 Unit	31,099,302.15
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Unit	33,025,000.00	APBD		1 Unit	34,676,250.00
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD		98%	169,500,000.00			98%	177,975,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Laporan	13,500,000.00	APBD		1 Laporan	14,175,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1 Laporan	156,000,000.00	APBD		1 Laporan	163,800,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inventris Kantor yang Terpelihara		98%	99,592,088.00			98%	104,571,692.40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bandar Lampung	1 Unit	44,430,000.00	APBD		1 Unit	46,651,500.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bandar Lampung	2 Unit	39,270,000.00	APBD		2 Unit	41,233,500.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Bandar Lampung	1 Unit	15,892,088.00	APBD		1 Unit	16,686,692.40
2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		74				74	1,611,749,878
	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		122 Lembaga	1,534,999,884			122 Lembaga	
	Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan keterampilan		90.63%				90.63%	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	59,999,905.00			100%	62,999,900.25
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 Dokumen	59,999,905.00	APBD		1 Dokumen	62,999,900.25

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	-	500 Orang	1,474,999,979.00	-	500 Orang	1,548,749,977.95
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Bandar Lampung	500 Orang	1,474,999,979.00	DAU	500 Orang	1,548,749,977.95
3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan		100%	294,256,956		100%	308,969,804
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		100%		100%		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	101,500,000.00		1 Dokumen	106,575,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 Dokumen	101,500,000.00	DAK	1 Dokumen	106,575,000.00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		10 Layanan	117,757,000.00		10 Layanan	123,644,850.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota (DAK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	10 Layanan	117,757,000.00	DAK	10 Layanan	123,644,850.00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan		100%	74,999,956.00		100%	78,749,953.80
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 Dokumen	74,999,956.00	AFBD	1 Dokumen	78,749,953.80
4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender		67.78%	3,158,999,722.00		67.78%	3,316,949,708.10
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender		67.78%	3,158,999,722.00		67.78%	3,316,949,708.10

	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bandar Lampung	1 Dokumen	34,999,959.00	APBD		1 Dokumen	36,749,956.95
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1 Dokumen	3,123,999,763.00	DAU		1 Dokumen	3,280,199,751.15
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		3.54%	34,998,048.00			3.54%	36,747,950.40
		Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		63.57%			63.57%		
		Rasio KDRT yang Tertangani		1.53%			1.53%		
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		56.31%			56.31%		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		3.54%	34,998,048.00			3.54%	36,747,950.40
		Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		63.57%			63.57%		
		Rasio KDRT yang Tertangani		1.53%			1.53%		
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		56.31%			56.31%		
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Bandar Lampung	1 Dokumen	34,998,048.00	APBD		1 Dokumen	36,747,950.40	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak		Nindya	100,000,000.00			Nindya	105,000,000.00
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71.70%			71.70%		
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak		Nindya	100,000,000.00			Nindya	105,000,000.00
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71.70%			71.70%		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Bandar Lampung	1 Organisasi	100,000,000.00	DAU		1 Organisasi	105,000,000.00	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan		100%	326,708,095.00			100%	343,043,499.75
		Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif		100%			100%		
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Bandar Lampung	100%	257,688,095.00			100%	270,572,499.75	

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Bandar Lampung	5 Orang	139,965,095.00	DAK		5 Orang	146,963,349.75
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)	Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan	Bandar Lampung	1 Layanan	117,723,000.00	APBD		1 Layanan	123,609,150.00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak-hak Anak		100%	69,020,000.00			100%	72,471,000.00
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan vagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Bandar Lampung	10 Orang	69,020,000.00	DAK		10 Orang	72,471,000.00
JUMLAH PROGRAM PENUNJANG				4,301,022,208				4,516,073,318.40
JUMLAH PROGRAM KEGIATAN				5,449,962,705				5,722,460,840.25
JUMLAH				9,750,984,913				10,238,534,158.65

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

(Dra. MARYAMAH)
NIP. 19670620 199303 2 005

POHON KINERJA DINAS PPPA KOTA BANDAR LAMPUNG

Sasaran RPJMD/Ulimate Outcome Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
Indikator 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
Outcome/Tujuan Renstra Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah
Indikator Level Kapabilitas APiP

Outcome 1 (sasaran Renstra) Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan.
Indikator: 1. Persentase OPD yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender 2. Persentase Peningkatan Ketrampilan Perempuan

Outcome 2 (sasaran Renstra): Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak.
INDIKATOR: 1. Tingkat capaian Kota Layak anak

Outcome 3 (sasaran Renstra): Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang terselesaikan
Indikator: 1. Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang terselesaikan.

Outcome 4 (sasaran Renstra): Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
Indikator: 1. Meningkatnya Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Oleh Inspektorat

Outcome 5 (sasaran Renstra): Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan PPPA
Indikator: 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
Indikator: 1. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) 2. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
Indikator: Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Indikator: Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Rasio KDRT yang Tertangani Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
Indikator: 1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan
Indikator: 1. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan 2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan
Indikator: 1. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan 2. Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator:

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten /Kota
Indikator: 1. Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: 1. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Rasio KDRT yang Tertangani

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: 1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: 1. Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
Indikator: Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Pemenuhan Hak-hak Anak

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota

1. Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

1. Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (DAU)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota (DAK)

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK)

Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kab/Kota

Indikator:
Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia

Indikator:
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator:
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia

Indikator:
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Indikator:
1.Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaann Kebijakan , Program & Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator:
1.Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator:
1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator:
1.Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan

Indikator:
1.Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan

Indikator:
1.Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Dra. MARYAMAH)
NIP. 19670620 199303 2 005**

POHON KINERJA DINAS PPPA KOTA BANDAR LAMPUNG 2024

Sasaran RPJMD/Ultimate Outcome Meningkatnya Penerapan Kebijakan
Indikator 1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
Outcome/Tujuan Renstra Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah
Indikator Level Kapabilitas APiP

Outcome 1 (sasaran Renstra) Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan.
Indikator: 1. Persentase OPD yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender 2. Persentase Peningkatan Ketrampilan Perempuan

Outcome 2 (sasaran Renstra): Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak.
Indikator: 1. Tingkat capaian Kota Layak anak

Outcome 3 (sasaran Renstra) Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan anak yang terselesaikan
Indikator: 1. Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang terselesaikan.

Outcome 4 (sasaran Renstra): Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
Indikator: 1. Meningkatnya Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Oleh Inspektorat

Outcome 5 (sasaran Renstra): Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan
Indikator: 1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang tepat waktu

PROGRAM PENGARUHTAMBAHAN GENDER DAN IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)
Indikator: 1. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) 2. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
Indikator: Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Indikator: Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Rasio KDRT yang Partisipasi

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
Indikator: 1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan
Indikator: 1. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan 2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan
Indikator: 1. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan 2. Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator:

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: 1. Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: 1. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator: 1. Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak

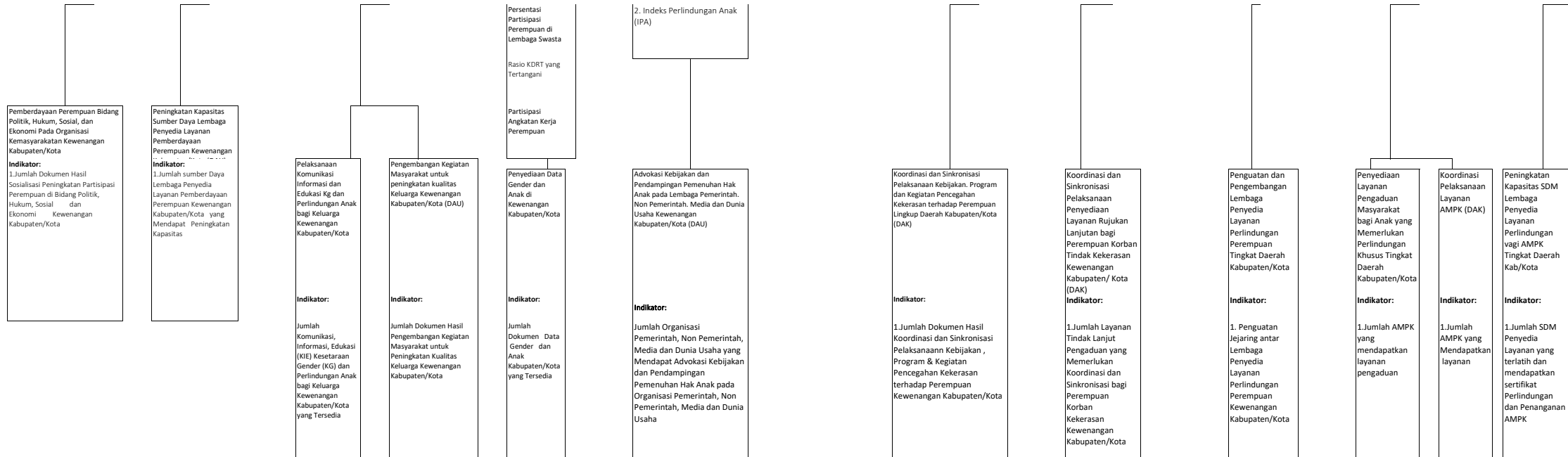
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: 1. Meningkatnya Pemahaman terkait Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota
Indikator: Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Perlindungan Perempuan

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator: Pemenuhan Hak-hak Anak



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

(Dra. MARYAMAH)
 NIP. 19670620 199303 2 005